

PERANAN MODAL SOSIAL DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI PERDESAAN INDONESIA

(The Role of Social Capital on Household Poverty Reduction in Rural Areas of Indonesia)

Ahmadrswan Nasution

Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pusat Statistik
Jl. Jagakarsa No. 70 Jakarta, 12620
Email: ahmadrswan73@gmail.com

Naskah diterima: 26 September 2016

Naskah direvisi: 06 Oktober 2016

Naskah diterbitkan: 30 Desember 2016

Abstract

Indonesia's poverty reduction policies tend to focus on economic approaches such as on the development of infrastructures (physical capital), credit assistance (financial capital), and education and health support (human capital). Actually, poverty is a complex problem, involving many resources, including social capital. This study investigates empirically the impact of the social capital on poverty in the rural areas of Indonesia. The social capital is measured by the composite index of the components of social capital (trust, norms, mutual cooperation, participation in social activities, and social networks), while the poverty is measured by household per capita expenditure. The method of analysis using a multiple linear regression model on a sample of 40,474 households. The source of the data from the results of a national survey conducted by BPS-Statistics Indonesia, namely Susenas 2012 and Podes 2011. The analysis showed that the average index of social capital of the rural households around 52.18 (maximum 100). The components of most instrumental in the formation of social capital of poor households are mutual trust. The results of further analysis showed that social capital together with human capital, financial capital, and physical capital have a positive effect on per capita household expenditure, so that they can contribute to reduce poverty. This finding suggests that the existence of social capital plays an important role in poverty reduction in the rural areas. Thus, the government and related agencies should endorse policies that facilitate to the strengthening of social capital for the poor households.

Keywords: social capital, household per capita expenditure, poverty, rural areas, Indonesia

Abstrak

Kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia cenderung mengandalkan pendekatan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur (modal fisik), bantuan kredit (modal keuangan), dan bantuan pendidikan dan kesehatan (modal manusia). Padahal, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, melibatkan banyak sumber daya termasuk modal sosial. Penelitian ini menganalisis peran modal sosial terhadap kemiskinan rumah tangga perdesaan di Indonesia. Modal sosial diukur berdasarkan indeks dimensi modal sosial (saling percaya, norma, gotong royong, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan jejaring sosial), sedangkan kemiskinan diukur dengan pengeluaran per kapita rumah tangga. Metode analisis menggunakan model regresi linier berganda pada sampel sebanyak 40.474 rumah tangga. Adapun sumber data dari hasil survei berskala nasional yang dilakukan oleh BPS, yaitu Susenas tahun 2012 dan Podes tahun 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata indeks modal sosial rumah tangga di perdesaan sebesar 52,18 (maksimum 100). Adapun komponen yang paling berperan dalam pembentukan modal sosial rumah tangga miskin adalah rasa saling percaya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa modal sosial bersama-sama dengan modal manusia, modal keuangan, dan modal fisik memberikan efek positif terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam pengurangan kemiskinan di perdesaan. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan membuat kebijakan yang memfasilitasi pengembangan modal sosial dalam upaya pengurangan kemiskinan di perdesaan Indonesia.

Kata kunci: modal sosial, pengeluaran per kapita rumah tangga, kemiskinan, perdesaan, Indonesia

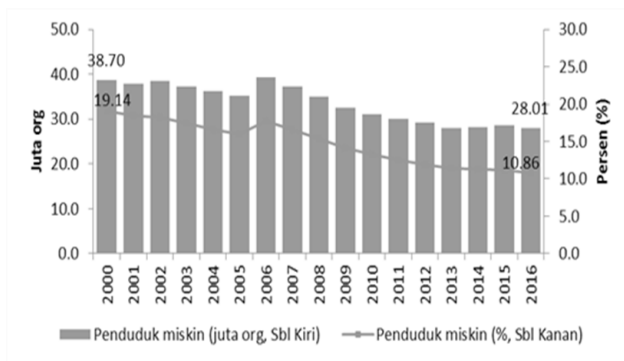
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama lebih dari 30 tahun, Indonesia menerapkan model pembangunan dengan menekankan pada pertumbuhan ekonomi (Zain, 2010; An-naf, 2012.). Pendekatan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan mendorong laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita. Pembangunan nasional dirancang secara sentralistik dan cenderung seragam. Keseragaman ini malah memunculkan pola dan pencapaian pembangunan yang berbeda antardaerah. Pembangunan yang sangat menekankan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per

kapita mulai menimbulkan persoalan pembangunan yang kompleks (Siregar & Wahyuniarti, 2007; Rustiadi, *et al.*, 2009). Hasil pembangunan menjadi bias dan belum sepenuhnya berhasil menciptakan pemerataan, sehingga memunculkan persoalan, di antaranya ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, dan penurunan kemiskinan yang melambat (Taifur, 2014; Nasution, 2015).

PDB Indonesia tahun 2015 sekitar USD864,93 miliar dengan pendapatan per kapita sebesar USD3.834,06. Berdasarkan pencapaian ini Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara maju G-20. Namun ada kontradiksi, pencapaian ini diikuti



Sumber: diolah dari BPS dalam www.bps.go.id.

Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2000-2015

dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, kesenjangan pendapatan yang memburuk, dan tingkat kesejahteraan menurut wilayah juga belum merata. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 28,01 juta orang atau sekitar 10,86 persen pada Maret 2016 (BPS, 2016). Ketimpangan pendapatan masih tinggi tercermin dari Indeks Gini mencapai 0,41 tahun 2015 (BPS, 2015a). Tingkat kesejahteraan menurut wilayah tidak merata tercermin dari pola penurunan kemiskinan yang beragam. Ada wilayah yang berhasil menurunkan kemiskinan relatif lebih cepat (Kawasan Barat Indonesia, KBI), namun ada wilayah yang penurunan kemiskinannya relatif lebih lambat (Kawasan Timur Indonesia, KTI) (Nasution, 2015). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembangunan di KBI lebih maju dibandingkan KTI (Miranti & Resosudarmo, 2005).

Secara makro, keberhasilan pengurangan kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan (baik jumlah dan persentase penduduk miskin) di Indonesia terus mengalami penurunan (Gambar 1). Namun, paradigma pembangunan selama beberapa dekade terakhir telah mengalami pergeseran. Terjadi pergeseran yang cenderung melihat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang diukur secara makro menjadi pendekatan wilayah (Rustiadi, *et al.*, 2009). Menilai kinerja pembangunan (misal pengurangan kemiskinan) tidak bisa hanya dilihat secara makro (nasional), tetapi perlu dilengkapi dengan indikator lain menurut wilayah, perdesaan-perkotaan, atau tingkat rumah tangga.

Ditinjau menurut wilayah, sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di perdesaan. Penduduk miskin di perdesaan pada 2016 mencapai 17,67 juta orang atau sekitar 63,08 persen (BPS, 2016). Tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan mengindikasikan bahwa pembangunan perdesaan masih belum optimal. Pembangunan di perdesaan belum dapat secara optimal memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada (Hayami, 2009; Rustiadi, *et al.*, 2009). Padahal,

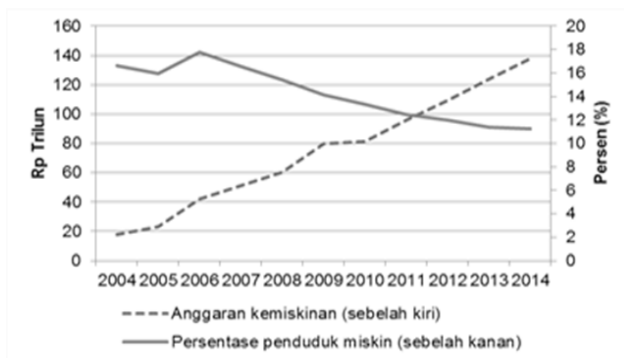
modal pembangunan terutama modal manusia, modal alam, dan modal sosial sebagian besar berada di daerah perdesaan (Fauzi, 2010; Purnomo & Dharmawan, 2007). Kurang optimalnya pembangunan perdesaan juga dikarenakan terjadinya *backwash effects*, yaitu mengalirnya berbagai sumber daya (modal alam, modal manusia, dan modal keuangan) dari perdesaan ke perkotaan (Rustiadi, *et al.*, 2009; Ke & Feser, 2010).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program pengentasan kemiskinan oleh kementerian dan lembaga. Program kemiskinan tersebut, di antaranya IDT (Inpres Desa Tertinggal); PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 1994-1999, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) tahun 1999-2008; Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) tahun 1979-2005; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2001 hingga sekarang; Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 1982 hingga 2006; Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 hingga sekarang; dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) sejak tahun 2007 hingga sekarang. Program-program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan departemen atau lembaga yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial, dan sektoral (Hadi, 2010). Di samping itu, program-program tersebut masih fokus pada pengembangan infrastruktur (modal fisik), bantuan kredit (modal keuangan), dan bantuan pendidikan (modal manusia).

B. Permasalahan

Perkembangan anggaran pengurangan kemiskinan dan pengurangan kemiskinan di Indonesia disajikan pada Gambar 2. Anggaran pengurangan kemiskinan tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur (modal fisik) di perdesaan, pemberian bantuan kredit (modal keuangan), dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan (modal manusia) (Hadi, 2010). Anggaran kemiskinan terus meningkat dari sebesar Rp18 triliun tahun 2004 menjadi Rp134,5 triliun pada tahun 2014 atau naik sebesar 647,2 persen. Sementara itu, untuk periode yang sama, terjadi penurunan kemiskinan secara relatif sebesar 32,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas anggaran kemiskinan dalam pengurangan kemiskinan mulai berkurang (Nasution, 2015). Dengan kata lain, efektivitas program pengentasan kemiskinan melalui kebijakan pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan kredit, dan pemberdayaan masyarakat mulai berkurang.

Persoalan kemiskinan berkaitan dengan sifat dan pola pembangunan suatu daerah. Pembangunan daerah dapat optimal karena adanya perubahan-perubahan organisasi sosial dan sistem nilai (Rustiadi, *et al.*, 2009). Adapun, produktivitas dan pengelolaan sumber daya dikondisikan oleh budaya dan modal



Sumber: Diolah dari BPS dalam www.bps.go.id dan Kemenkeu dalam <http://www.anggaran.depkeu.go.id>.

Gambar 2. Perkembangan Anggaran dan Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2004-2014

sosial yang ada di masyarakat setempat (Hayami, 2009). Implementasi kebijakan pengurangan kemiskinan perlu membangun institusi-institusi sosial yang memungkinkan terbentuknya modal sosial yang berperan dalam mengentaskan kemiskinan di perdesaan Indonesia (Rustiadi, *et al.*, 2009; Fauzi, 2010; Slamet, 2010). Modal sosial telah terbukti berperan dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia (Grootaert, 1999; Vipriyanti, 2007; Slamet, 2010; Nasution, *et al.*, 2014a, 2014b). Penelitian di negara-negara berkembang lain juga menunjukkan peran penting modal sosial dalam mengurangi kemiskinan (Narayan & Pritchett, 1999; Grootaert, 2001; Grootaert, *et al.*, 2002a, 2002b, 2002c; Aker, 2007; Okunmadewa, *et al.*, 2005, 2007; Yusuf, 2008; Hassan & Birungi, 2011; Tenzin, *et al.*, 2013).

Tingkat kemiskinan secara makro menunjukkan kecenderungan menurun, namun belum dapat sepenuhnya menjelaskan peran modal sosial dalam pengurangan kemiskinan tingkat rumah tangga di perdesaan. Perluanya perhatian pengurangan kemiskinan di perdesaan bukan saja karena tingkat kemiskinan yang tinggi, tetapi dapat memberi dampak eksternal positif terhadap pengurangan kemiskinan di perkotaan dan secara nasional. Untuk itu, dibutuhkan penilaian kuantitatif peran modal sosial terhadap pengurangan kemiskinan rumah tangga di perdesaan Indonesia. Pemahaman peran modal sosial terhadap kemiskinan dapat menjadi pengetahuan dalam menyusun kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas, tingkat kemiskinan secara makro menunjukkan kecenderungan menurun, namun belum dapat sepenuhnya menjelaskan peran modal sosial dalam pengurangan kemiskinan di level mikro. Oleh karena itu, diperlukan penelitian pada tingkat yang lebih kecil yaitu tingkat rumah tangga di perdesaan Indonesia. Akumulasi modal sosial di tingkat

rumah tangga perdesaan berpotensi sebagai salah satu strategi dalam mengurangi kemiskinan. Di samping itu, perlunya mengetahui faktor-faktor pengurangan kemiskinan di perdesaan, selain tingkat kemiskinan yang tinggi, juga dapat memberi dampak terhadap pengurangan kemiskinan di perkotaan dan secara nasional. Untuk itu, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu (1) menganalisis pengaruh modal sosial terhadap pengurangan kemiskinan rumah tangga di perdesaan dan (2) menganalisis faktor-faktor pengembangan modal sosial di perdesaan.

II. KERANGKA TEORI

A. Modal Sosial dan Kemiskinan

Konsep modal sosial mengenai interaksi sosial antarindividu telah menjadi topik utama dalam beberapa bidang penelitian. Meskipun masih dalam perdebatan, peran modal sosial pada aspek sosial dan ekonomi merupakan suatu paradigma baru dalam pembangunan inklusif¹. Interaksi sosial terjadi karena adanya saling membantu antarindividu, antarkomunitas, dan antarkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun definisi modal sosial masih beragam dan dipahami secara berbeda, telah terjadi konvergensi menuju pada jejaring sosial (*network*), norma (*norm*), dan nilai-nilai (*values*) yang memfasilitasi kerja sama (*collective action*) (Healy & Hampshire, 2002). Jejaring sosial adalah relasi individu-individu yang saling kenal sebagai keluarga, teman, atau tetangga pada suatu kelompok (Putnam, 1995). Norma adalah aturan tidak tertulis yang menggambarkan nilai-nilai sebuah kelompok (Coleman, 1988). Komunikasi dan interaksi antarindividu sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan tertentu dan norma-norma sosial di masyarakat setempat. Interaksi antarindividu dalam kelompok menunjukkan sikap saling percaya (*trust*) (Grootaert & Narayan, 2004). Sikap saling percaya dapat diciptakan dan dikembangkan melalui pendidikan dan interaksi individu-individu yang relatif beragam (Uslaner, 2004).

Modal sosial dapat memengaruhi pengurangan kemiskinan rumah tangga melalui tiga jenis eksternalitas positif (Collier, 2002). Pertama, modal sosial memfasilitasi transmisi pengetahuan tentang perilaku orang lain, mengurangi masalah oportunistik melalui interaksi yang berulang, dan membangun rasa saling percaya antaranggota. Kedua, modal sosial memfasilitasi transmisi pengetahuan tentang teknologi dan pasar, mengurangi kegagalan informasi (asimetri informasi). Transmisi pengetahuan dapat terjadi dengan mengumpulkan informasi dalam konteks jejaring sosial,

¹ Pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, memberi akses sosial dan akses ekonomi yang mengikutsertakan seluruh masyarakat secara terus-menerus mengurangi kemiskinan (Cook, 2006; Rauniyar & Kanbur, 2010).

baik interaksi satu arah maupun interaksi timbal-balik. Kedua eksternalitas ini dapat mengurangi oportunistik, yang dicapai melalui transaksi berulang dan reputasi. Transaksi berulang memiliki efek mencegah masuknya orang lain (*free rider*) yang cenderung merugikan rumah tangga miskin. Adapun reputasi akan memperbesar keuntungan dari transaksi berulang. Transaksi berulang menghasilkan rasa percaya dalam hubungan timbal-balik, sedangkan reputasi memungkinkan rumah tangga miskin mendapat kepercayaan untuk meningkatkan akses terhadap transaksi atau sumber daya ekonomi.

Ketiga, dengan mengandalkan norma dan aturan, modal sosial mengurangi masalah penumpang gelap (*free rider*), sehingga memfasilitasi tindakan kolektif dalam mencapai tujuan bersama (mengurangi kemiskinan). Dengan demikian, efek eksternalitas ketiga ini adalah tindakan kolektif. Tindakan kolektif dicapai melalui norma-norma dan aturan yang disepakati dan berlaku bagi semua anggota kelompok. Modal sosial lebih bermanfaat bagi rumah tangga miskin untuk mensubstitusi modal manusia, modal keuangan, dan modal fisik.

Modal sosial memfasilitasi rumah tangga miskin menerima manfaat dari keanggotaannya dalam kelompok sosial. Apabila biaya keanggotaan dalam arisan adalah waktu, maka orang miskin memiliki keuntungan, karena akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga kaya. Rumah tangga miskin akan tetap merasa dilindungi, walaupun tidak mampu membayar iuran keamanan atau kebersihan dengan adanya norma-norma dan aturan setempat. Dengan demikian, adanya modal sosial rumah tangga miskin memperoleh banyak keuntungan dari anggota lain dalam meningkatkan penghasilan. Rumah tangga miskin akan memiliki banyak insentif dibanding rumah tangga tidak miskin (kaya) apabila berpartisipasi dalam kelompok sosial sebagai instrumen modal sosial.

Kelompok sosial membutuhkan pemimpin, yang mungkin didominasi oleh rumah tangga yang berpenghasilan lebih tinggi. Biasanya, rumah tangga yang berpenghasilan tinggi atau tokoh masyarakat lebih dihormati oleh rumah tangga miskin (Collier, 2002). Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan untuk memulai tindakan bersama menjadi lebih rendah, karena inisiatif tindakan kolektif dari tokoh masyarakat cenderung akan menghasilkan penghasilan (pendapatan) bagi rumah tangga miskin. Selanjutnya, norma-norma dan aturan yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat cenderung menarik rumah tangga kaya untuk bergabung. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial memberi manfaat ekonomi bagi rumah tangga miskin yang berpartisipasi dalam kelompok yang memiliki status sosial-ekonomi yang heterogen (Abdelhak, *et al.*, 2012).

B. Penelitian Modal Sosial dan Kemiskinan di Indonesia

Penelitian mengenai peran modal sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dilakukan pertama kali oleh Grootaert (1999) di tiga provinsi, yaitu Jambi, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menganalisis modal sosial pada tingkat mikro (individual, rumah tangga) dan meso (komunitas). Batasan yang digunakan mencakup asosiasi horizontal dan vertikal untuk menganalisis hubungan antara modal sosial, kesejahteraan rumah tangga dan kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan hampir sama dengan peran modal manusia. Rumah tangga dengan modal sosial tinggi memiliki pengeluaran per kapita lebih tinggi, memiliki aset fisik dan tabungan lebih banyak, serta akses terhadap kredit yang lebih baik. Hasil penelitian Grootaert (1999), sejalan dengan hasil penelitian Vipriyanti (2007) di Provinsi Bali, Slamet (2010) di Surakarta, dan Nasution, *et al.* (2014a) khusus di perdesaan Indonesia, di mana masing-masing menggunakan cara yang berbeda dalam mengukur modal sosial.

Vipriyanti (2007), menemukan bahwa modal sosial memiliki keterkaitan yang nyata dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Modal sosial menyambung (*bridging*) memberi kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, sebaliknya berpengaruh positif terhadap produktivitas. Nasution, *et al.* (2014a), menemukan bahwa partisipasi kepala rumah tangga dalam organisasi kemasyarakatan (sebagai proksi modal sosial) secara positif berpengaruh terhadap peningkatan pengeluaran per kapita rumah tangga, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita rumah tangga secara positif terkait dengan akses terhadap organisasi kemasyarakatan.

Slamet (2010), melakukan penelitian hubungan antara institusi sosial, modal sosial dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu institusi sosial, modal sosial, dan interaksi antara kedua variabel, serta pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor struktural yaitu perubahan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan politik. Di samping itu, pola kemiskinan mengikuti ciri-ciri individu, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, umur, agama, dan tingkat pendidikan orang tua. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak berhubungan dengan modal sosial *bonding*, tetapi berhubungan dengan *bridging* dan *linking*. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan, penghasilan, dan agama tidak

memberi pengaruh terhadap modal sosial *bonding*. Modal sosial *bridging* dan *linking* sangat kuat dipengaruhi oleh pendapatan dan pendidikan. Adapun, umur memiliki hubungan negatif dengan modal sosial *bonding*, *bridging*, maupun *linking*.

III. METODOLOGI

A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari hasil survei berskala nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2012 (Susenas 2012) dan Pendataan Potensi Desa/Kelurahan tahun 2011 (Podes 2011). Susenas 2012 merupakan survei level rumah tangga, sedangkan Podes 2011 merupakan registrasi tingkat desa/kelurahan. Susenas 2012 mengumpulkan informasi tentang karakteristik demografi, karakteristik sosial-ekonomi, dan pengeluaran rumah tangga, dan informasi tentang modal sosial untuk masing-masing rumah tangga. Podes 2011 mengumpulkan data tentang infrastruktur di desa, namun dalam penelitian ini hanya mengambil sebagian informasi yang terkait dengan instrumen atau pembentuk modal sosial saja, yaitu keberadaan pasar permanen di perdesaan.

B. Metode Analisis

Metode analisis menerapkan kerangka pemikiran yang telah dilakukan oleh Ellis (1998) dan Grootaert (1999). Penelitian ini berasumsi bahwa setiap rumah tangga perdesaan memiliki akses terhadap modal 'konvensional' (modal manusia, modal fisik, dan modal keuangan) dan modal sosial. Rumah tangga perdesaan menggunakan modal tersebut dalam membuat keputusan tentang penawaran tenaga kerja yang dikombinasikan dengan permintaan barang dan jasa dalam kegiatan produktif (menghasilkan pendapatan). Harga input barang dan jasa dalam kegiatan produktif pada setiap rumah tangga perdesaan diasumsikan tetap dan eksogen. Artinya, tidak mengalami perubahan sepanjang observasi. Asumsi ini digunakan karena disamping data tidak tersedia juga menggunakan data *cross section* satu tahun (2012). Permintaan rumah tangga perdesaan terhadap barang dan jasa dikombinasikan dengan pasokan tenaga kerja dalam menghasilkan pendapatan. Disini, modal sosial juga sebagai salah satu aset yang menentukan keputusan tersebut. Sehingga modal sosial yang dikombinasikan dengan modal manusia, modal fisik, dan modal keuangan digunakan dalam kegiatan produktif tersebut. Selanjutnya, konsumsi dan tabungan merupakan fungsi dari tingkat pendapatan rumah tangga perdesaan. Model pendugaan persamaan tingkat pendapatan yang diukur dengan pengeluaran per kapita rumah tangga perdesaan sebagai proksi kemiskinan, diformulasikan sebagai berikut:

$$\ln(E_{ij}) = \alpha + \beta_1 SC_{ij} + \beta_2 HC_{ij} + \beta_3 OC_{ij} + \beta_4 X_{ij} + \beta_5 Z_j + \mu_{ij} \dots (1)$$

- di mana:
- E_{ij} : pengeluaran per kapita rumah tangga ke-i desa ke-j;
 - SC_{ij} : indeks modal sosial rumah tangga ke-i desa ke-j;
 - HC_{ij} : modal manusia yang diukur dengan lama sekolah kepala rumah tangga ke-i desa ke-j;
 - OC_{ij} : aset rumah tangga ke-i desa ke-j;
 - X_{ij} : karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga ke-i desa ke-j;
 - Z_j : keberadaan pasar permanen di desa ke-j (*dummy*);
 - α, β : merupakan dugaan bagi parameter; dan
 - μ_{ij} : gangguan (*error term*).

Persamaan di atas, digunakan untuk menganalisis pengaruh langsung modal sosial terhadap kemiskinan rumah tangga di perdesaan. Adapun untuk melakukan estimasi menggunakan metode *ordinary least squares* (OLS).

C. Definisi dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Kemiskinan

Ada tiga pendekatan utama untuk pengukuran kemiskinan menurut Asra (2012) yaitu, pendapatan, pengeluaran rumah tangga, dan indikator kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pengeluaran per kapita rumah tangga untuk mengukur kemiskinan, karena pengukuran pendapatan di perdesaan *under estimate*. Data pendapatan rumah tangga yang tersedia pada Susenas 2012 hanya yang berasal dari pekerjaan utama kepala rumah tangga.

Pengeluaran per kapita rumah tangga diukur dari pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan selama sebulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita rumah tangga telah digunakan dalam berbagai penelitian (Grootaert, 1999; Grootaert & Bastelaer, 2002a, 2002b; Aker, 2007; Okunmadewa, *et al.*, 2007; Yusuf, 2008; Hassan & Birungi, 2011; Kirori, *et al.*, 2011; Adepoju & Oni, 2012; Tenzin, *et al.*, 2013; Baiyegunhi, 2014).

Penggunaan pengeluaran per kapita rumah tangga mengasumsikan bahwa (i) setiap anggota dalam rumah tangga mengonsumsi barang dan jasa adalah sama, tanpa memandang usia dan jenis kelamin, (ii) setiap anggota rumah tangga memiliki kebutuhan yang sama,

tanpa memandang usia dan jenis kelamin, dan (iii) pengeluaran dua atau tiga orang atau lebih yang hidup bersama adalah sama seperti jika mereka hidup secara terpisah (Mukherjee & Benson, 2003).

2. Variabel Modal Sosial

Penelitian ini menggunakan pendekatan indeks (*social capital index*) mengukur modal sosial. Modal sosial dinyatakan sebagai modal yang terdiri dari rasa percaya (rasa percaya), kepatuhan terhadap norma yang berlaku (norma), kemampuan membangun jejaring sosial (jejaring sosial), partisipasi dalam kelompok sosial yang mendasari kohesi sosial (partisipasi dalam kelompok sosial), serta partisipasi dalam kepentingan umum (gotong royong).

Dimensi rasa percaya merupakan gabungan dari rasa percaya kepada tokoh masyarakat dan kepada tetangga. Dimensi norma merupakan kesediaan rumah tangga membantu orang lain dan kemudahan mendapat bantuan dari tetangga. Dimensi jejaring sosial adalah banyaknya organisasi lokal yang diikuti kepala rumah tangga. Dimensi partisipasi dalam kelompok sosial merupakan partisipasi rumah tangga dalam mengikuti kegiatan sosial. Terakhir, dimensi gotong royong merupakan partisipasi rumah tangga dalam kegiatan bersama untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah dan untuk kepentingan umum. Indeks dimensi modal sosial rumah tangga diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Z_{ij} = \frac{(X_{ij} - \min(X_{ij}))}{(\max(X_{ij}) - \min(X_{ij}))} \dots\dots\dots (2)$$

- di mana: Z_{ij} : indeks dimensi ke-j (j=1,2...5) untuk rumah tangga ke-i;
 X_{ij} : nilai skor dimensi ke-j untuk rumah tangga ke-i;
 $\min X_{ij}$: skor minimum untuk dimensi modal sosial ke-j; dan
 $\max X_{ij}$: skor maksimum untuk dimensi modal sosial ke-j.

Setelah mengukur indeks masing-masing dimensi modal sosial selanjutnya dihitung indeks modal sosial untuk setiap rumah tangga. Indeks modal sosial rumah tangga dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari semua indeks dimensi modal sosial yang dihitung menggunakan persamaan (2). Besarnya penimbang (α_j) untuk masing-masing dimensi menggunakan analisis komponen utama (*principal component analysis*). Indeks modal sosial untuk rumah tangga ke-i dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$SC_i = \sum_{j=1}^5 \alpha_j Z_{ij} \dots\dots\dots (3)$$

di mana: SC_i : adalah indeks modal sosial rumah tangga ke-i;

α_j : penimbang dimensi modal sosial ke-j; dan

Z_{ij} : indeks dimensi modal sosial ke-j untuk rumah tangga ke-i.

3. Variabel Bebas Lainnya

Banyak literatur yang menemukan bahwa kemiskinan rumah tangga di perdesaan ditentukan oleh sejumlah faktor. Kemiskinan di perdesaan dipengaruhi oleh modal sosial, modal manusia, modal fisik, modal keuangan, karakteristik demografi kepala rumah tangga, dan karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga (ukuran rumah tangga dan pekerjaan kepala rumah tangga) (Aker, 2007; Yusuf, 2008; Abdul-Hakim, *et al.*, 2010; Hassan & Birungi, 2011; Adepoju & Oni, 2012; Tenzin, *et al.*, 2013; Anyanwu, 2011, 2014).

Pendidikan dapat meningkatkan stok modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas, sehingga akan mengurangi kemiskinan (Hassan & Birungi, 2011; Tenzin, *et al.*, 2013; Anyanwu, 2011). Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan sangat penting, karena peningkatan pendidikan memengaruhi penurunan kemiskinan.

Hubungan antara usia dan kemiskinan tidak linear (Datt & Jolliffe, 1999; Gang, *et al.*, 2006). Pendapatan atau pengeluaran akan rendah pada usia yang relatif muda, lalu meningkat pada usia pertengahan, dan kemudian menurun lagi pada usia tua. Menurut hipotesis siklus hidup, kemiskinan yang relatif tinggi dijumpai pada usia muda, menurun selama usia pertengahan, dan kemudian meningkat kembali pada usia tua (Datt & Jolliffe, 1999).

Jumlah anggota rumah tangga sangat menentukan jumlah kebutuhan rumah tangga. Semakin banyak anggota rumah tangga, maka berarti semakin banyak pula kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Dengan demikian, semakin banyak anggota rumah tangga berkaitan dengan menurunnya pendapatan per kapita rumah tangga (atau berhubungan negatif dengan kemiskinan) (Hassan & Birungi, 2011; Nasution, *et al.*, 2014a, 2014b).

Pada umumnya perempuan di perdesaan lebih rentan terhadap kemiskinan karena pendidikan yang rendah dan kurangnya kesempatan untuk memiliki aset-aset produktif seperti lahan pertanian. Fenomena kemiskinan rumah tangga di perdesaan yang dikepalai perempuan meliputi: adanya diskriminasi terhadap perempuan di pasar tenaga kerja, atau perempuan cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan karenanya mereka dibayar dengan upah yang lebih rendah (Anyanwu, 2011). Sehingga kemiskinan banyak dijumpai pada rumah tangga yang dikepalai

perempuan dibanding dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki (Bastos, *et al.*, 2009).

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan (BPS, 2015b).

Pada penelitian ini, data tentang kepemilikan aset-aset produktif rumah tangga (seperti lahan pertanian, ternak, dan peralatan pertanian) sebagai ukuran modal fisik tidak tersedia. Untuk itu, kepemilikan luas lantai rumah digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur modal fisik rumah tangga di perdesaan. Salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2012).

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar luas lantai rumah, maka kepala rumah tangga semakin sehat dan produktif dalam meningkatkan pendapatan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Pada umumnya, kepala rumah tangga di perdesaan Indonesia secara rata-rata berumur sekitar 47 tahun, berpendidikan setingkat sekolah dasar, lebih didominasi jenis kelamin laki-laki (86 persen) dan berstatus menikah (83 persen). Status kepemilikan rumah pada umumnya milik sendiri (88 persen) dan lebih dari 50 persen memiliki pekerjaan utama di sektor pertanian. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga sekitar 4 orang dengan rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga sebesar Rp552,73 ribu per bulan.

Rata-rata indeks modal sosial rumah tangga di perdesaan sebesar 52,18 (maksimum 100). Modal sosial beserta komponennya lebih besar dijumpai pada rumah tangga kaya (Kuantil 5) dibanding rumah tangga miskin (Kuantil 1). Dimensi modal sosial yang

Tabel 1. Ringkasan Definisi, Pengukuran Variabel, dan Hipotesis dalam Analisis

Variabel	Definisi	Pengukuran	Hipotesis
Variabel Tidak Bebas:			
Pengeluaran per kapita rumah tangga	Jumlah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga	Rupiah/per kapita/per bulan	
Variabel Bebas:			
Indeks modal sosial	Indeks komposit modal sosial	Indeks bernilai 0 s.d. 100	+ (Hassan & Birungi, 2011)
Lama sekolah	Pendidikan kepala rumah tangga yang diukur dari lama sekolah formal	tahun	+ (Anyanwu, 2011)
Jenis kelamin	Jenis kelamin kepala rumah tangga	Bernilai 1 jika laki-laki, 0 jika perempuan	-/+
Umur	Umur kepala rumah tangga	tahun	-/+
Status perkawinan	Status perkawinan kepala rumah tangga	Bernilai 1 jika menikah, 0 jika lainnya	-/+
Ukuran rumah tangga	Ukuran rumah tangga	Banyaknya anggota rumah tangga	- (Nasution, <i>et al.</i> , 2014a)
Kredit usaha	Akses rumah tangga terhadap kredit usaha	Bernilai 1 jika menerima, 0 jika lainnya	+ (Nugroho, 2008)
Pekerjaan utama	Lapangan usaha utama kepala rumah tangga	Bernilai 1 jika pertanian, 0 jika lainnya	- (BPS, 2015b)
Status rumah	Status kepemilikan tempat tinggal	Bernilai 1 jika milik sendiri, 0 jika lainnya	+ (BPS, 2012)
Lantai	Luas lantai rumah	Meter persegi (m ²)	+ (BPS, 2012)
Pasar permanen	Keberadaan pasar permanen di desa	Bernilai 1 jika ada, 0 jika lainnya	+ (Nasution, 2015)

Sumber: Hasan & Birungi, 2011 dan Nasution, 2015.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Karakteristik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi
Pengeluaran per kapita rumah tangga (Rp000/kapita/bulan)	552,73	567,83
Lama sekolah (tahun)	6,90	3,45
Jenis kelamin (1=laki-laki) (persen)	86%	-
Umur (tahun)	47,45	13,83
Status perkawinan (1=menikah) (persen)	83%	-
Ukuran rumah tangga	3,87	1,73
Kredit usaha (1=menerima) (persen)	10%	-
Pekerjaan utama (1=pertanian) (persen)	58%	-
Status rumah (1=milik sendiri) (persen)	88%	-
Lantai (m ²)	19,61	17,70
Pasar permanen (1=ada) (persen)	22%	-

Sumber: diolah dari Susenas, 2012 dan Podes, 2011.

paling berperan pada rumah tangga miskin adalah rasa saling percaya.

Komponen yang berkontribusi paling tinggi terhadap rasa percaya adalah rasa percaya terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tetangga. Pada umumnya rumah tangga di perdesaan masih percaya menitipkan anak-anak, pinjam-meminjam uang/barang, dan merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga. Rasa percaya terhadap tokoh masyarakat juga relatif tinggi, di mana peran tokoh masyarakat cukup besar dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk kegiatan gotong-royong (kegiatan bersama).

Rasa percaya rumah tangga miskin terhadap tokoh masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga kaya. Dengan demikian, perlu adanya kebijakan untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan tokoh masyarakat agar dapat membimbing rumah tangga

miskin terutama memanfaatkan berbagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan penghasilan.

Pengalaman di Boosaaso, sebuah kota kecil di Somalia, di mana banyak keluarga miskin dapat keluar dari kesulitan ekonomi karena adanya peran kepala suku dibantu masyarakat setempat. Kepala suku bersama-sama dengan masyarakat setempat memperbaiki jaringan perdagangan dan melakukan berbagai upaya meningkatkan pendapatan (Buckly, 1996 dalam Grootaert, 2001).

D. Peran Modal Sosial terhadap Kemiskinan

Pada bagian ini, menganalisis pengaruh modal sosial terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga (proksi kemiskinan). Untuk memperkirakan pengaruh modal sosial terhadap kemiskinan menggunakan model regresi dengan metode OLS. Model OLS yang digunakan menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga sebagai fungsi dari kepemilikan modal sosial dan faktor eksogen lainnya, dengan asumsi bahwa manfaat ekonomi modal sosial dapat diukur. Pendugaan terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga dilakukan dua tahap, pertama tanpa modal sosial (Tabel 4) dan dengan modal sosial (Tabel 5). Hasil pendugaan, menunjukkan bahwa semua hasil perkiraan koefisien variabel eksogen signifikan dalam menjelaskan variasi perubahan pengeluaran per kapita rumah tangga.

Modal manusia yang diukur dari lama sekolah kepala rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga, sehingga menurunkan kemiskinan. Peningkatan satu tahun lama sekolah kepala rumah tangga akan berpengaruh terhadap peningkatan pengeluaran per kapita rumah tangga sebesar sebesar 4,5 persen. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa modal manusia dalam bentuk lama sekolah dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan termasuk pasar tenaga kerja, sehingga

Tabel 3. Indeks Modal menurut Kuantil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga

Indeks Modal Sosial	Kuantil Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga per Bulan					Total
	K1 (miskin)	K2	K3	K4	K5 (kaya)	
Indeks modal sosial	50,34	51,83	52,27	52,59	53,88	52,18
• Rasa percaya	65,45	65,71	65,24	64,78	64,13	65,06
• Norma	58,89	60,64	61,12	61,30	62,50	60,89
• Gotong royong	58,10	58,35	58,37	58,64	58,62	58,42
• Partisipasi dalam kelompok sosial	46,17	48,79	49,70	50,24	52,53	49,48
• Jejaring sosial	21,47	24,15	25,52	26,73	30,62	25,70

Sumber: diolah dari Susenas, 2012.

Keterangan: *) Kuantil: K5 menunjukkan 20 persen terkaya dan K1 menunjukkan 20 persen termiskin (Grootaert & Narayan, 2004).

memberikan kesempatan kerja yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan penghasilan.

Ukuran rumah tangga ditemukan memiliki hubungan terbalik dengan pengeluaran rumah tangga, sehingga memiliki hubungan positif dengan kemiskinan. Kenaikan satu unit ukuran rumah tangga yang diukur dari banyaknya anggota rumah tangga berpengaruh terhadap penurunan pengeluaran per kapita rumah tangga sebesar 12,87 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga sangat menentukan jumlah kebutuhan rumah tangga. Semakin banyak anggota rumah tangga, maka berarti semakin banyak pula kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi (mengurangi pendapatan rumah tangga). Hasil temuan ini, menunjukkan bahwa rumah tangga dengan ukuran yang lebih besar cenderung lebih miskin dibanding dengan rumah tangga yang lebih kecil terutama di perdesaan (Lanjouw & Ravallion, 1995; Adepoju & Oni, 2012; Tenzin, *et al.*, 2013; Anyanwu, 2014; Baiyegunhi, 2014).

Umur kepala rumah tangga perdesaan berhubungan positif dengan pengeluaran per kapita rumah tangga. Hal ini menunjukkan peningkatan umur kepala rumah tangga perdesaan berkaitan dengan peningkatan pendapatan. Di perdesaan Indonesia, kepala rumah tangga yang lebih tua memiliki akses yang lebih baik terhadap aset produktif daripada yang lebih muda dalam meningkatkan pengeluaran rumah tangga, tetapi umur kuadrat kepala rumah tangga bertanda negatif. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan seiring dengan meningkatnya umur kepala rumah tangga. Namun setelah melewati batas umur tertentu (batas usia produktif), peningkatan umur kepala rumah tangga akan menurunkan pengeluaran rumah tangga seiring dengan menurunnya produktivitas.

Hasil yang menarik menunjukkan bahwa rumah tangga pertanian di perdesaan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga. Artinya, rumah tangga sektor non-pertanian cenderung lebih sejahtera dibanding rumah tangga pertanian. Temuan ini mengindikasikan, walaupun di perdesaan kegiatan ekonomi sangat tergantung pada pertanian (*on farm*), sektor non-pertanian tetap merupakan sumber pendapatan yang penting bagi rumah tangga di perdesaan. Untuk meningkatkan pendapatan, rumah tangga di perdesaan perlu didorong untuk memiliki akses bekerja di non-pertanian terutama yang masih terkait dengan sektor pertanian (*off farm*), misalnya industri pengolahan hasil pertanian (Rustiadi, *et al.*, 2009; Schneider & Gugerty, 2011).

Hasil yang menarik, pendugaan hubungan kepemilikan rumah dengan pengeluaran rumah tangga berbeda dengan hipotesis, sehingga hasil ini perlu dikonfirmasi dengan penelitian selanjutnya. Namun, ada fenomena menarik di perdesaan Indonesia, di

Tabel 4. Hasil Pendugaan Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Perdesaan Tanpa Modal Sosial

Variabel Bebas	Variabel Tidak Bebas: Logaritma Natural (Ln) Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
	Koef.	t	Sig.
Lama sekolah (tahun)	0,0447***	54,54	0,000
Jenis kelamin (1=laki-laki)	0,1535***	13,31	0,000
Umur (tahun)	0,0204***	17,45	0,000
Umur kuadrat	-0,0002***	-17,63	0,000
Status perkawinan (1=kawin)	-0,1416***	-0,13	0,000
Ukuran rumah tangga	-0,1287***	-81,52	0,000
Kredit usaha (1=menerima)	0,0885***	10,51	0,000
Pekerjaan utama (1=pertanian)	-0,1066***	-19,99	0,000
Status rumah (1=milik sendiri)	-0,0841***	-10,44	0,000
Lantai (m ²)	0,0024***	36,52	0,000
Pasar permanen (1=ada)	0,0444***	7,33	0,000
Konstanta	12,6880***	439,01	0,000
Observasi	40.474		
Adjusted R ²	26,12 persen		

Sumber: diolah dari Susenas, 2012 & Podes, 2011.

Keterangan: *** menunjukkan signifikan pada tingkat 1 persen.

mana banyak rumah tangga yang dihuni bersama oleh beberapa keluarga (dapur bersama), sehingga pengeluaran per kapita rumah tangga cenderung kecil. Adanya pengelolaan dapur bersama ini (yang mengakibatkan pengeluaran per kapita rumah tangga cenderung kecil), sehingga kemungkinan kepemilikan rumah sendiri memiliki hubungan negatif terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga²

Keberadaan pasar permanen di desa berpengaruh positif terhadap peningkatan pengeluaran per kapita rumah tangga di perdesaan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa dengan adanya pasar permanen di perdesaan memberi peluang bagi rumah tangga miskin berpartisipasi dalam kegiatan jual-beli di pasar tersebut. Partisipasi rumah tangga miskin dalam transaksi ekonomi di pasar tersebut dapat memberi penghasilan tambahan dalam upaya meningkatkan pendapatan, sehingga berpeluang besar keluar dari kemiskinan.

² Dalam penelitian ini rumah tangga didefinisikan sebagai sekelompok orang atau keluarga yang hidup bersama dan makan dari satu dapur.

Analisis selanjutnya dengan memasukkan variabel modal sosial ke dalam model pendugaan pengeluaran per kapita rumah tangga (Tabel 5). Setelah memasukkan variabel modal sosial pada persamaan model pendugaan, hasilnya sedikit meningkatkan kekuatan variabel-variabel eksogen dalam menjelaskan variasi pengeluaran per kapita rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial bersama-sama dengan variabel lain memberikan sedikit kenaikan dalam menjelaskan variasi pengeluaran per kapita rumah tangga perdesaan.

Pada Tabel 5 terlihat, setelah memasukkan variabel modal sosial pada model pendugaan pengeluaran per kapita rumah tangga, menunjukkan sebagian besar pendugaan peubah bebas memiliki tanda yang sesuai hipotesis dan konsisten. Namun, besaran koefisien beberapa variabel, misalkan lama sekolah dan umur mengalami penurunan.

Hasil pendugaan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa indeks modal sosial signifikan memengaruhi pengeluaran per kapita rumah tangga di perdesaan.

Tabel 5. Hasil Pendugaan Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Perdesaan dengan Modal Sosial

Variabel	Variabel Tidak Bebas: Logaritma Natural (Ln) Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga		
	Koef.	t	Sig.
Indeks modal sosial	0,0026***	12,78	0,0000
Lama sekolah (tahun)	0,0432***	52,21	0,0000
Jenis kelamin (1=laki-laki)	0,1478***	12,83	0,0000
Umur (tahun)	0,0192***	16,37	0,0000
Umur kuadrat	-0,0002***	-16,61	0,0000
Status perkawinan (1=kawin)	-0,1470***	-13,51	0,0000
Ukuran rumah tangga	-0,1290***	-81,84	0,0000
Kredit usaha (1=menerima)	0,0801***	9,50	0,0000
Pekerjaan utama (1=pertanian)	-0,1101***	-20,66	0,0000
Status rumah (1=milik sendiri)	-0,0896***	-11,13	0,0000
Lantai (m ²)	0,0023***	35,40	0,0000
Pasar permanen (1=ada)	0,0454***	7,50	0,0000
Konstanta	12,6152***	429,08	0,0000
Observasi	40.474		
Adjusted R ²	26,42 persen		

Sumber: diolah dari Susenas, 2012 dan Podes, 2011.

Keterangan: *** menunjukkan signifikan pada tingkat 1 persen.

Setiap kenaikan satu satuan indeks modal sosial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga perdesaan sebesar 0,3 persen. Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya pada tingkat mikro rumah tangga (Narayan & Pritchett, 1999; Maluccio, *et al.*, 2000; Tiepoh & Reimer, 2004) yang menemukan bahwa modal sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan yang diukur dengan pendapatan per kapita rumah tangga.

Namun hasil di atas bertentangan dengan hasil temuan Van Ha, *et al.* (2004) yang menunjukkan bahwa modal sosial yang diukur berdasarkan keanggotaan asosiasi tidak berdampak pada peningkatan pengeluaran rumah tangga pada komunitas tertentu. Abdelhak, *et al.* (2012) juga menemukan bahwa modal sosial (rumah tangga yang mendapat bantuan) tidak signifikan memengaruhi pendapatan rumah tangga. Setelah diteliti lebih lanjut, dikarenakan rumah tangga berada dalam komunitas yang cenderung homogen miskin dan tidak dijumpai organisasi sosial di komunitas tersebut.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa akses terhadap modal sosial menjadi relevan dan penting dalam peningkatan pendapatan (pengeluaran per kapita) rumah tangga dan pengentasan kemiskinan. Sehingga pengentasan kemiskinan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga perluasan akses terhadap sumber-sumber daya kehidupan yang difasilitasi oleh modal sosial.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Rumah tangga miskin perdesaan memiliki modal manusia dan modal keuangan yang relatif rendah dibandingkan rumah tangga kaya (tidak miskin). Pada umumnya kepala rumah tangga miskin berpendidikan setingkat sekolah dasar dan memiliki keterbatasan dalam mengakses bantuan kredit untuk usaha. Dimensi modal sosial yang berkontribusi paling tinggi terhadap pembentukan modal sosial rumah tangga miskin adalah rasa percaya, disusul oleh norma dan gotong royong. Sedangkan, dimensi modal sosial yang masih rendah, yaitu partisipasi dalam kegiatan sosial dan jejaring sosial.

Modal sosial memiliki hubungan positif terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga, sehingga mengurangi kemiskinan. Artinya akumulasi modal sosial dapat meningkatkan akses modal lain (modal manusia, modal keuangan, dan modal fisik) berkaitan dengan peningkatan penghasilan rumah tangga miskin. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam pengurangan kemiskinan. Kebijakan pengurangan kemiskinan tidak hanya terkait dengan peningkatan modal ekonomi,

tetapi juga perluasan akses terhadap modal sosial. Akses rumah tangga miskin terhadap modal sosial dapat memfasilitasi peningkatan akses modal ekonomi melalui transmisi informasi, peluang kerja sama (perluasan jejaring sosial), dan sikap saling percaya.

Transmisi informasi meningkatkan ketersediaan informasi bagi rumah tangga miskin dan menurunkan “biaya” mengakses sumber daya ekonomi, sehingga berpeluang meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Ketersediaan informasi, mendorong partisipasi rumah tangga miskin dalam kegiatan bersama dan meningkatkan rasa saling percaya di antara rumah tangga di perdesaan. Selanjutnya, sikap saling percaya akan memudahkan setiap kelompok (rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin) untuk bekerja sama dalam kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan, sehingga mengurangi kemiskinan di perdesaan Indonesia.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, upaya-upaya untuk mengembangkan modal sosial di tingkat rumah tangga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pengurangan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan pembangunan perdesaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya diharapkan berdampak pada penguatan modal sosial. Pengembangan modal sosial akan meningkatkan rasa saling percaya, sehingga akan meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam mensukseskan program pengurangan kemiskinan. Pengembangan modal sosial harus bersifat inklusif, sehingga rumah tangga miskin tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial (akses sosial) dan peningkatan pendapatan (akses ekonomi).

Penelitian ini telah mengidentifikasi jalur non-ekonomi pengurangan kemiskinan rumah tangga perdesaan, yaitu transmisi informasi, peluang kerja sama, dan peningkatan rasa saling percaya. Ketiga jalur ini dapat meningkatkan akses terhadap modal manusia dan modal keuangan, namun berpotensi memiliki masalah *endogeneity*. Munculnya masalah endogenitas karena modal sosial merupakan kegiatan di waktu luang (*leisure*), sehingga permintaan terhadap *leisure* diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Pada penelitian ini belum mempertimbangkan masalah *endogeneity*, sehingga penelitian lebih lanjut perlu mengatasi persoalan endogenitas tersebut, misalnya dengan menggunakan metode pendugaan variabel instrumen.

Lalu, berkaitan dengan beragamnya cara dalam mengukur modal sosial, penelitian lebih lanjut perlu menganalisis faktor-faktor pembentuk modal sosial. Di samping itu, penelitian lebih lanjut mempertimbangkan mengukur kemiskinan dengan menggunakan pendekat-

an lain, misalkan pendekatan pendapatan atau indikator kesejahteraan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asra, A. (2012). *Tinjauan pustaka: Kemiskinan di dalam: Konsep dan ukuran kemiskinan alternatif*. Editor: Firdausy CM. Jakarta: LIPI.
- BPS. (2012). *Survei demografi dan kesehatan Indonesia 2012 (Laporan Pendahuluan)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2013). *Statistik modal sosial 2012*. Jakarta: BPS.
- Collier, P. (2002). *Social capital and poverty: A microeconomic perspective*. The role of social capital in development: An empirical assessment.
- Fauzi, A. (2010). *Landasan pembangunan perdesaan*. Di dalam: *Pembangunan perdesaan: Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Editor: Chozin M. Bogor: IPB Pres.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, R. D. (2009). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- BPS. (2015b). *Data dan informasi kemiskinan kabupaten kota 2014*. BPS. Jakarta

Jurnal dan Working Paper

- Abdelhak, S., Sulaiman, J., & Mohd, S. (2012). The role of assets in the enhancement of households' income: A study of poverty alleviation among rural communities of Kelantan and Terengganu. *Asian Social Science*, 8(12), 145-153.
- Abdul-Hakim, R., Abdul-Razak, N. A., & Ismail, R. (2010). Does social capital reduce poverty? A case study of rural households in Terengganu, Malaysia. *European journal of social sciences*, 14(4), 556-566.
- Adepoju, A., & Oni, O. (2012). Investigating endogeneity effects of social capital on household welfare in Nigeria: A control function approach. *Quarterly Journal of International Agriculture*, 51(1), 73-96.
- Aker, J. C. (2007). *Social networks and household welfare in Tanzania: Working together to get out of poverty*. University of California-Berkeley.

- An-naf, J., (2012). Tinjauan analitis terhadap model pembangunan Indonesia. *Jurnal FISIP: KYBERNAN*, 2(01): 69-82.
- Anyanwu, J. C. (2011). Towards reducing poverty in Nigeria: the case of Igboland. *J Econ Int Finance* 2: 513-528.
- Anyanwu, J. C. (2014). Marital status, household size and poverty in Nigeria: Evidence from the 2009/2010 survey data. *African Development Review*, 26(1), 118-137.
- Baiyegunhi, L. J. S. (2014). Social capital effects on rural household poverty in Msinga, KwaZulu-Natal, South Africa. *Agrekon* 53(2): 47-64.
- Bastos, A., Casaca, S. F., Nunes, F., & Pereirinha, J. (2009). Women and poverty: A gender-sensitive approach. *The Journal of Socio-Economics*, 38(5), 764-778.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American journal of sociology*, S95-S120.
- Cook, S. (2006). Structural change, growth and poverty reduction in Asia: Pathways to inclusive development. *Development Policy Review*, 24(s1), s51-80.
- Datt, G., & Jolliffe, D. (1999). Determinants of poverty in Egypt: 1997. Food Consumption and Nutrition Division Discussion Paper 75.
- Ellis, F. (1998). Household strategies and rural livelihood diversification. *The journal of development studies*, 35(1), 1-38.
- Gang, I.N., Sen, K., and Yun, M.S. (2006). *Poverty in rural India: Ethnicity and caste*, Working papers//Department of Economics, Rutgers, the State University of New Jersey.
- Grootaert, C. (1999). *Social capital, household welfare, and poverty in Indonesia*. World Bank Policy Research Working Paper (2148).
- Grootaert, C. (2001). *Does social capital help the poor?-a synthesis of findings from the local level institutions studies in Bolivia, Burkina Faso, and Indonesia*.
- Grootaert, C., & Bastelaer, V.T. (2002a). *The role of social capital in development: An empirical assessment*: Cambridge University Press.
- Grootaert, C., & Bastelaer, V.T. (2002b). *Understanding and measuring social capital: A multidisciplinary tool for practitioners*: World Bank Publications.
- Grootaert, C., Oh, G.T., and Swamy, A. (2002c). *Social capital, household welfare and poverty in Burkina Faso*. *Journal of African Economies* 11(1): 4-38.
- Grootaert, C., and Narayan, D. (2004). *Local institutions, poverty and household welfare in Bolivia*. *World Development* 32(7): 1179-1198.
- Hadi, A. P. (2010). Tinjauan terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Hassan, R. & Birungi, P. (2011). Social capital and poverty in Uganda. *Development Southern Africa*, 28(1), 19-37.
- Hayami, Y. (2009). Social capital, human capital and the community mechanism: Toward a conceptual framework for economists. *Journal of Development Studies*, 45(1), 96-123.
- Healy, K. & Hampshire, A. (2002). Social capital: A useful concept for social work?. *Australian Social Work*, 55(3), 227-238.
- Ke, S. & Feser, E. (2010). Count on the growth pole strategy for regional economic growth? Spread-backwash effects in Greater Central China. *Regional Studies*, 44(9), 1.131-1.147.
- Kirori, G. N., Mariara, J. W. K., & Kiriti Ng'ang'a, T. W. (2011). Impacts of social capital on household consumption expenditure in rural Kenya: An instrumental variable approach. *International Journal of Afro-Asian Studies*, 2(1): 15-33.
- Lanjouw, P., & Ravallion, M. (1995). Poverty and household size. *The Economic Journal*, 105(433): 1.415-1.434.
- Maluccio, J., Haddad, L., & May J. (2000). Social capital and household welfare in South Africa, 1993-98. *The Journal of Development Studies*, 36(6), 54-81.
- Miranti, R. & Resosudarmo, B. P. (2005). Understanding regional poverty in Indonesia: Is poverty worse in the East than in the West. *Australasian Journal of Regional Studies*, The 11(2), 141-154.
- Mukherjee, S. & Benson, T. (2003). Determinants of poverty in Malawi, 1998. *World Development*, 31(2), 339-58.
- Narayan, D. & Pritchett, L. (1999). Cents and sociability: Household income and social capital in rural Tanzania. *Economic Development and Cultural Change*, 47(4), 871-897.

- Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Hadi, S. (2014a). Dampak partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan terhadap pendapatan rumah tangga perdesaan di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(3), 222 - 227.
- Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Hadi, S. (2014b). Dampak modal sosial terhadap kesejahteraan Rumah Tangga Perdesaan di Indonesia. *MIMBAR*, 30(2): 137-148.
- Nugroho, A. E. (2008). A Critical review of the link between social capital and microfinance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 23(2), 124-142.
- Okunmadewa, F., Yusuf, S., & Omonona, B. (2005). Social capital and poverty reduction in Nigeria. Revised Report Submitted to Africa Economic Research Consortium (AERC) Nairobi, Kenya.
- Okunmadewa, F., Yusuf, S., & Omonona, B. (2007). Effects of social capital on rural poverty in Nigeria. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 4(3), 331-339.
- Purnomo, A. M., & Dharmawan, A. H. (2007). Transformasi struktur nafkah pedesaan: pertumbuhan "modal sosial bentukan" dalam skema pengelolaan hutan bersama masyarakat di Kabupaten Kuningan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2): 193-216.
- Putnam, R. (1995). Bowling alone. *Journal of Democracy*, 6 (1), 65-78.
- Rauniyar, G. & Kanbur, R. (2010). Inclusive growth and inclusive development: A review and synthesis of Asian Development Bank literature. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(4), 455-469.
- Schneider, K. & Gugerty, M. K. (2011). Agricultural productivity and poverty reduction: Linkages and pathways. *Libraries Test Journal*, 1(1), 56-74.
- Taufur, W. D. (2014). Kebijakan pembangunan yang berpihak kepada penduduk miskin. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 12(2): 233-252.
- Tenzin, G., Otsuka, K., & Natsuda, K. (2013). Impact of social capital on poverty: A case of rural households in Eastern Bhutan. Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS), Working Paper Series RWP-13.004.
- Tiepo, M. G. N. & Reimer, B. (2004). Social capital, information flows, and income creation in rural Canada: A cross-community analysis. *The Journal of Socio-Economics*, 33(4), 427-448.
- Uslaner, E. M. (2004). Trust and social bonds: Faith in others and policy outcomes reconsidered. *Political Research Quarterly*, 57(3), 501-507.
- Van Ha N., Kant, S., MacLaren, V. (2004). The contribution of social capital to household welfare in a paper-recycling craft village in Vietnam. *The Journal of Environment & Development*, 13(4), 371-399.
- Yusuf, S. A. (2008). Social capital and household welfare in Kwara State, Nigeria. *Journal of Human Ecology*, 23(3), 219-229.
- Zain, M., (2010). Reformasi Pengentasan kemiskinan: Dari pendekatan ekonomi ke pendekatan kesejahteraan. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, FISIP-Universitas Air Langga*, 12, 79-96.

Sumber lain

- BPS. (2015a). *Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia September 2015*. Berita Resmi Statistik, No.37/04/Th. XIX, 18 April 2016. BPS. Jakarta.
- BPS. (2016). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2016*. Berita Resmi Statistik, No. 66/07/Th. XIX, 18 Juli 2016. BPS. Jakarta.
- Nasution, A. (2015). *Peran modal sosial pengurangan kemiskinan rumah tangga perdesaan di Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2007). *Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin*. Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan (Vol. 21).
- Slamet, Y. (2010). *The relationships between social institutions, social capital and their effects on poverty reduction*. Disertasi Universiti Utara Malaysia. Diperoleh tanggal 30 Juli 2014, dari http://etd.uum.edu.my/2381/2/1.Yulius_Slamet.pdf.
- Vipriyanti, N.U. (2007). *Studi sosial ekonomi tentang keterkaitan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi wilayah: Studi kasus di empat kabupaten di Provinsi Bali*. Disertasi. Program Pascasarjana. IPB. Bogor.